Ekonomi Publik

Dr. H. Amiruddin Idris, S.E., M.Si.

EKONOMI PUBLIK

UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

EKONOMI PUBLIK

Dr. H. Amiruddin Idris, S.E., M.Si.

Jl. Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
e-mail: deepublish@ymail.com

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

IDRIS, Amiruddin
Ekonomi Publik/oleh Amiruddin Idris.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Februari 2016.

xi, 173 hlm.; Uk:15.5x23 cm

ISBN **978-602-401-187-1**

1. Ekonomi I. Judul
330

Desain cover : Herlambang Rahmadhani
Penata letak : Invalindiant Candrawinata

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

KATA PENGANTAR
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Almuslim

Sebagaimana dimaklumi, bahwa masalah pengelolaan sumber daya manusia adalah suatu masalah yang sampai saat ini masih sulit dipecahkan. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk dalam jumlah yang besar seharusnya memiliki sumber daya manusia yang memiliki daya guna yang tinggi.

Saat ini sangat sedikit buku yang menyajikan teori - teori tentang ekonomi publik. Buku ini harus kita apresiasi karena mampu menyajikan teori dalam bidang ekonomi publik. Buku ini akan sangat berguna bagi dosen, mahasiswa dan khalayak umum lainnya yang tertarik untuk mempelajari tentang pengelolaan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan karena secara lengkap menyajikan banyak teori dan pemecahan masalah pengelolaan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan.

Untuk itu atas nama pribadi dan selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim Bireuen Aceh, mengucapkan selamat dan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada penulis atas terbitnya buku ini. Semoga buku yang ditulis oleh pengarang yang berkompeten ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan masyarakat banyak.

Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Almuslim

Sonny Muhammad I

DAFTAR ISI

BAB I
KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP EKONOMI PUBLIK

1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Publik

1.1.1. Pengertian Ekonomi Publik

Istilah "ekonomi publik" adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan publik. Kata **ekonomi** berarti kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan (*needs)* dan keinginan atau (*wants)* untuk peningkatan kualitas kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Kata publik dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan urusan dan perhatian banyak orang banyak (*Publik affairs),* pendapat orang banyak (*public opinion),* wilayah dan kepentingan orang banyak (*Public domain),* atau menyangkut kepentingan dan hajat hidup atau kesejahteraan orang banyak (*Public interest and public welfare)*. Kesimpulannya ekonomi publik dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi nasional guna mencapai kesejahteraan masyarakat, yang bertanggung jawab pengaturannya berada pada negara yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara khususnya pemerintah.

Ilmu ekonomi publik didasarkan pada beberapa landasan pikir sebagai berikut:

1. Masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi produksi dan alokasi konsumsi, serta masalah makroekonomi yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, dan pertumbuhan ekonomi.

2. Sistem perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi (pemerintah atau bukan) serta bagaimana keputusan ekonomi diambil. Apakah melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga.
3. Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang lain). Secara umum saat ini diakui bahwa swasta harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini mampu mengatasinya.
4. Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat sahih. Sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaah konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.

1.1.2. Ruang Lingkup Ekonomi Publik

Secara spesifik ekonomi publik membahas peran negara yang dijalankan oleh pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian lingkup dari bahasan ekonomi publik meliputi:

a. Analisis dan desain kebijakan publik (*analysis and design of public policy*).
b. Keuangan negara (*public-finance*) khususnya berkaitan dengan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) termasuk dampak pajak dan pengeluaran pemerintah pada

kesejahteraan rakyat (*distributional effects of taxation and goverment expenditures*).

c. Analisis kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah (*analysis of market failure and goverment failure*) dalam mewujudkan kesejahteraan publik.

Kinerja ekonomi publik suatu negara dipengaruhi oleh bentuk hubungan dan interaksi para aktor dan pelaku ekonomi dinegara tersebut melalui suatu mekanisme atau aturan main yang disepakati bersama. Secara umum pelaku ekonomi publik pada negara yang beradap dan bermartabat serta demokratis, dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menjadi tiga kelompok besar yaitu:

1. Penyelenggara Negara (*Political Society*)

   Penyelenggara negara lazimnya terdiri dari 3 pilar yang berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan bernegara. Ketiga lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

   a. Eksekutif atau pemerintah
   b. Legislatif atau parlemen
   c. Yudikatif atau lembaga peradilan

   Kelompok penyelenggara negara ini mempunyai peran strategis dan penting dalam ekonomi publik. Kelompok inilah yang mengatur proses atau aturan main berjalannya aktivitas ekonomi di masyarakat, melalui berbagai peraturan dan kebijakannya. Berbagai peraturan kebijakan penyelenggara negara ini berujung pada bentuk alokasi dan distribusi penggunaan sumber daya yang menggerakkan aktivitas ekonomi dimasyarakat. Hasil dari kebijakan yang dibuat penyelenggara negara ini adalah terbentuknya iklim usaha yang merupakan faktor penentu bagi pengusaha untuk melakukan aktivitas usahanya, dalam menghasilkan

barang dan jasa, dan membuka lapangan pekerjaaan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

2. Kelompok Dunia Usaha (*Bussines Society*)
   Kelompok ini adalah para pengusaha (pembisnis), yang berprofesi dan berperan sebagai penghasil (produsen) barang dan jasa dimasyarakat, dengan tujuan mendapat laba usaha.Kelompok bisnis ini adalah pelaku kegiatan ekonomi publik yang terlihat nyata perannya dilapangan. Kelompok inilah yang menggerakkan ekonomi publik, yang menciptakan nilai tambah (*value added*) ditengah masyarakat, seperti membuka lapangan usaha bagi masyarakat, menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat konsumen, membayar pajak dan retribusi kepada negara (sebagai sumber utama keuangan negara). Dengan demikian sebenarnya peran pelaku usaha ini cukup penting dan menentukan perkembangan ekonomi publik.

3. Kelompok Masyarakat Madani (*civil society)*
   Kelompok ini adalah masyarakat yang peduli (*concern and care*) terhadap hak-hak publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kelompok ini lebih mewakili kepentingan publik atau masyarakat luas, sebagai konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan para produsen, maupun konsumen dan pelayanan yang disediakan oleh negara, dan produsen dari faktor produksi, seperti tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik faktor produksi lainnya. Keseimbangan kepentingan berbagai kelompok masyarakat juga dapat digambarkan dari keseimbangan berbagai kepentingan ekonomi masing-masing kelompok dimasyarakat. Keseimbangan ini sangat berpengaruh pada kinerja ekonomi publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Kegagalan Pasar dan Campur Tangan Pemerintah

Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, mekanisme akan menyebabkan barang yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit dan dalam hal yang sangat ekstrim kegagalan pasar akan menyebabkan pasar terjadi "failure" sehingga barang dan jasa tertentu tidak dihasilkan pasar tersebut. Esensi timbulnya kegagalan pasar karena masyarakat tidak bertindak secara kooperatif, sebab perilaku kooperatif akan menghasilkan terjadinya kondisi Pareto Optimum.

Dalam hal terjadinya kegagalan pasar, maka pemerintah diharapkan untuk ikut campur tangan agar alokasi sumber ekonomi dapat tercapai secara efisien. Kegagalan pasar terjadi karena adanya faktor-faktor di bawah ini, yaitu:

1. Adanya Common Goods
2. Adanya unsure ketidaksempurnaan pasar
3. Adanya barang public
4. Adanya eksternalitas
5. Adanya pasar tidak penuh *(incomplete market)*
6. Adanya kegagalan inforamasi
7. Unemployment
8. Adanya ketidakpastian

1.2.1. Barang Bersama (*common goods*)

Penyebab dasar timbulnya sistem pasar persaingan adalah adanya hak pemilikan (property rights) yang memberikan hak pemilikan kepada setiap individu atas suatu barang sehingga dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang tersebut. Untuk beberapa jenis barang, hak pemilikan tidak dapat diberikan kepada satu individu melainkan diberikan kepada sekelompok

masyarakat, misalnya saja sebidang padang rumput milik desa, tanah ulayat, sumber mata air dan sebagainya. Oleh karena manfaat dari barang-barang di atas tidak hanya dirasakan oleh satu insividu saja, maka tidak seorangpun yang dapat menjual. Dalam situasi ini, maka David Hume menyatakan akan timbul apa yang disebut dengan tragedy kebersamaan (*tragedy of commons*). David Hume memberikan contoh sebidang tanah gembalaan yang dimiliki sekelompok orang yang dapat dimanfaat oleh anggota kelompok tersebut untuk menggembalakan ternaknya, akan tetapi tidak seorangpun secara individual dapat menjual hak kepemilikannya sehingga tidak ada pasar untuk tanah tersebut. Oleh karena setiap orang dapat menggembalakan tenaknya maka setiap orang akan cenderung menggunakan tanah tersebut secara berlebihan (over used) sehingga tanah tersebut akan menjadi tandus dengan cepat. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal kekayaan yang dimiliki bersama maka perilaku yang optimal bagi setiap individu merupakan tindakan yang optimal dipandang dari segi kelompok. Masalah yang timbul dalam kasus kekayaan bersama karena ada dua factor, yaitu invisibility dan jumlah kelompok masyarakat. Apabila jumlah anggota kelompok hanya dua orang, maka diantara kedua orang tersebut akan dibuat suatu perjanjian yang mengatur penggunaan kekayaan tersebut secara optimal tetapi apabila anggota kelompok semakin banyak maka biaya untuk memperoleh persetujuan menjadi semakin besar dan mahal.

Dalam hal kekayaan bersama (common property), apabila seseorang yang merasakan manfaat padang penggembalaan tersebut, berarti orang lain juga akan menerima manfaat tanpa harus ikut menanggung biayanya yang disebut dengan free riders. Free riders adalah suatu sikap yan tidak menyatakan dengan

sebenarnya manfaat suatu barang atau jasa dengan maksud agar ia dapat memanfaatkan barang tersebut tanpa harus membayarnya atau ikut menanggung biaya pengadaan barang atau jasa tersebut.

Dalam hal contoh di atas, menurut David Hume, maka pemerintahlah yang harus melakukan pengaturan atas penggunaan padang penggembalaan di atas. Jadi dalam hal ini, peranan pemerintah adalah mengalokasikan penggunaan padang penggembalaan agar tercapai kepuasaan bersama yang optimal (Pareto Optimal) dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja membutuhkan biaya, dan karena itu maka pemerintah harus juga menetapkan sistem pembayaran yang sifatnya dipaksakan karena jelas setiap individu tidak bersedia untuk menanggung biaya pengaturan di atas. Sistem pembayaran paksaan tersebut adalah yang umumnya disebut dengan pajak.

1.2.2. Adanya Unsur Ketidaksempurnaan Pasar

Pada pasar persaingan sempuran maka setiap produsen maupun konsumen merupakan satu unit yang sangat kecil sehingga baik konsumen maupun produsen secara individual tidak akan dapat mempengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurang barang yang dijual ayau barang yang dibeli.

Gambar 1 menunjukan kurva biaya marjinal (MC=Marginal Cost), kurva penerimaan (MR=Marginal Revenue) dan kurva penerimaan rata-rata (AR=Average Revenue) pada suatu pasar persaingan sempurna. Produsen yang melaksanakan prinsip keuntungan yang maksimum akan menghsilkan barang X pada tingkat produksi dimana MC=MR, yaitu pada tingkat produksi OX_1. Pada tingkat produksi sebesar X_2 biaya marjinal sebesar BX_2sedangkan penerimaan marjinal sebesar AX_2. Jadi dengan memproduksi X_2 maka produsen memperoleh keuntungan AB

sehingga tindakan yang logis bagi produsen adalah menaikkan jumlah barang yang dihasilkan. Sebaliknya, pada tingkat produksi OX_3 biaya marjinal sebesar CX_3 lebih besar daripada penerimaan marjinal DX_3 sehingga produksi X_3 menimbulkan kerugian bagi produsen dan tindakan yang logis diambil adalah mengurangi produksinya. Jadi tingkat produksi OX_1 adalah yang optimal karena pada produksi X_1 biaya marjinal sama dengan penerimaan marjinal.

Pada tingkat produksi OX_1 tersebut alokasi sumber ekonomi tercapai secara efisien. Pada titik E, $MC=P_0$ yang berarti produsen menetapkan harga sesuai dengan tambahan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit terakhir (MC). Harga yang terjadi (P_0) digunakan seluruhnya untuk membayar factor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan X_1. Sebaliknya, konsumen bersedia membayara sesuai dengan yang ditunjukkan oleh kurva permintaan, yaitu sebesar P_0 per unit barang ($AR=P_0$).
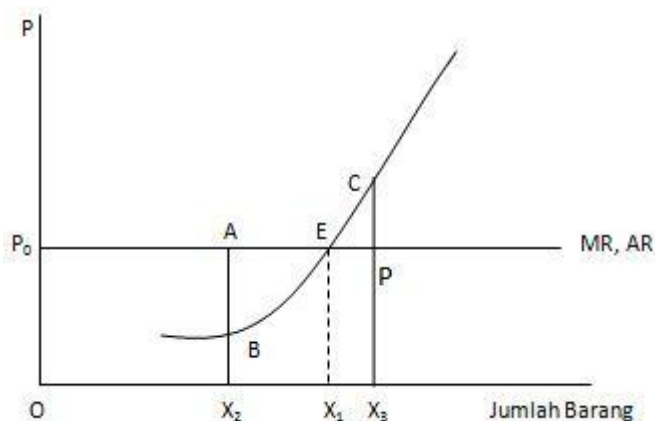
Pasar Persaingan Sempurna

Pada tingkat harga P_0 konsumen bersedia membayar harga tersebut untuk membeli barang X_1. Jadi, di sini ju7mlah barang yang diminta produsen sama dengan harga yang mau dibayar oleh konsumen. Karena itu, kondisi alokasi sumber ekonomi yang efisien terjadi apabila MC = AR = P. Pada pasar persaingan sempurna, keinginan konsumen dan produsen selaras pada jumlah brang sebanyak OX_1.

Pada pasar monopoli, produsen yang mempunyai prinsip keuntungan yang maksimal akan mengahsilkan barang X sebanyak OX_1, yaitu tingkat produksi di mana MC=MR, pada gambar di bawah ini produksi sebesar OX_1 tersebut, harga yang dipungut sebesar OP_1, sedangkan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan output X_1 hanya sebesar CX_1 yang berarti produsen memperoleh keutungan monopolis.
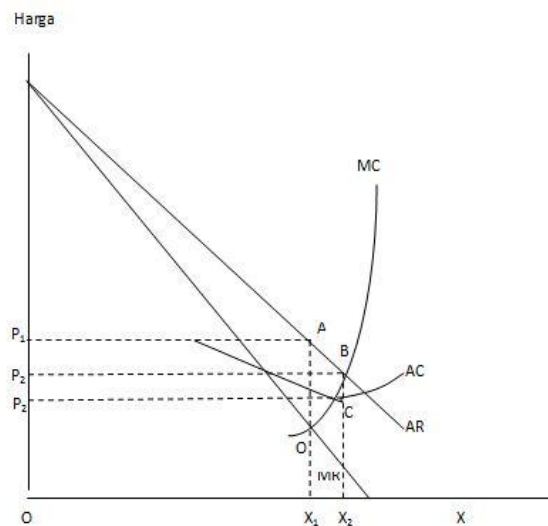
Pasar Monopoli

Efisiensi Penggunaan Sumber ekonomi dan produksi tercapai pada titik B yaitu pada tingkat produksi OX_2 dan harga OP_2. Pada titik B tersebut konsumen bersedia membayar harga barang sebesar Rp BX_2 atau sebesar Rp OP_2 dan biaya yang diperlukan produsen untuk menghasilkan tambahan barang terakhir (MC) juga sebesar Rp OP_2.

1.2.3. Monopoli Alamiah

Ada beberapa jenis barang yang hanya dapat diproduksikan oleh satu produsen saja. Betapa pun pemerintah berusaha untuk menghapus monopoli pada produksi satu industri, akan tetapi persaingan di antara produsen yang ada akan menyebabkan hanya satu produsen saja yang mampu bertahan.
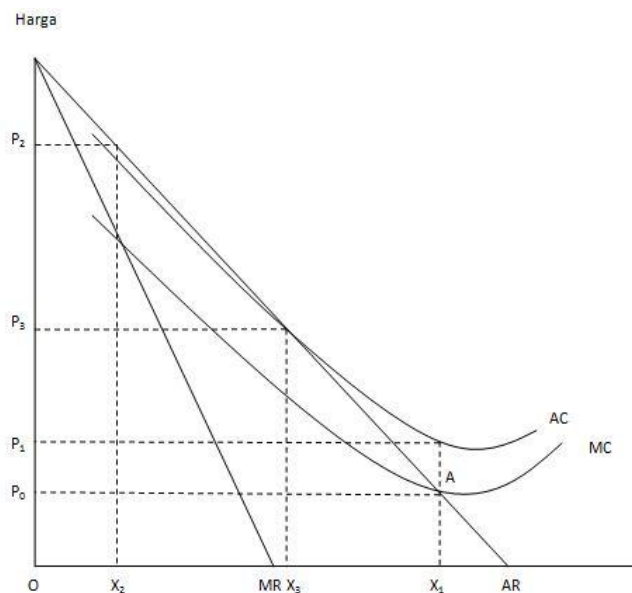
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa permintaan akan barang X sangat kecil, sehingga kurva permintaan (AR) memotong

kurva biaya rata-rata (AR) pada bagian yang menurun. Apabila produsen berproduksi pada tingkat produksi yang oleh masyarakat dianggap efisien, yaitu pasa MC=AR produsen akan menghasilkan OX_1 unit barang, dan menjula barng X dengan harga OP_0. Tetapi pada tingkat produksi OX_1 produsen akan rugi sehingga tingkat produksi OX_1 tidak dapat berlangsung dalm waktu yang lama atau dalam jangka panjang. Pada OX_1, penerimaan total sebesar OX_1AP_0 sedangkan pengeluran total sebesar OX_1BX_1. Sehingga terdapat kerugian sebesar BAP_0P_1. Apabila barang tersebut harus diproduksikan sebanyak OX_1 unit, maka tidak akan ada seorang produsen pun yang mau menghasilkannya. Oleh karena itu pemerintah harus campur tangan yang dapt diwujudkan dalm beberapa bentuk. Campur tangan pemerintah dapat dengan cara memproduksikan barang tersebut oleh pemerintah, atau produksi barang X dapat diserahkan kepada pihak swasta dengan memberikan ganti rugi sebesar P_OABP_1, sehingga produsen swasta tidak menderita rugi karena besarnya subsidi tersebut memnyebabkan penerimaan total sama dengan pengeluaran total (TR=TC).

1.2.4. Adanya Kegagalan Informasi

Pada beberapa kasus masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh swasta, misalnya saja prakiraan cuaca. Para petani, pelaut sangat membutuhkan informasi mengenai prakiraan cuaca. Dalam hal ini, maka pemerintah harus menyediakan informasi cuaca yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

1.2.5. Kegagalan Pemerintah (*Government Failures*)

Adanya kegagalan pasar merupakan salah satu sebab mengapa pemerintah harus turun tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Walaupun demikian, tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan secara sistematis senantiasa terjadi kegagalan pemerintah (government failures). Ini disebabkan karena pemerintah melaksanakan fungsi alokasi tidak dengan cara yang efisien. Tidak efisiennya pemerintah disebabkan oleh empat hal, yaitu: 1) informasi yang terbatas; 2) pengawasan yang terbatas atas reaksi pihak swasta; 3) pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat; 4) hambatan dalam proses politik.

1.2.6. Analisis Ekonomi Mengenai Birokrasi

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pencapaian alokasi sumber ekonomi yang efisien. Akan tetapi, birokrat yang tersiri dari banyak organ pemerintah tidaklah melaksanakan fumgsi pemerintah tanpa mempetanyai kebijakan pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Weber. Pandangan Weber ini dimodifikasi oleh Niskanen yang menyatakan bahwa birokrat, sebagaimana dengan orang lain, adalah pihak yang memaksimumkan kepuasannya, yaitu gaji, jumlah karyawan, reputasi dan status sosialnya. Karena fungsi utilitas birokrat berkaitan dengan besarnya anggaran, maka seorang birokrat yang berusaha mencapai kepuasan yang maksimum berarti pula ia merupakan orang yang memaksimumkan anggaran pemerintah. Karena seorang birokrat bukanlah seorang yang netral terhadap proses pembuatan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, birokrat cenderung akan menghasilkan barang atau jasa yang yang lebih besar dari ada yang seharusnya, sehingga terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber ekonomi oleh pemerintah.

Kritik terhadap teori perilaku birokrat yang yang cenderung mengajukan dana/anggaran yang lebih besar daripada tingkat produksi output yang secara sosial adalah optimal (socially

optimal), datang dari beberapa ekonom, diantaranya Jackson yang berpendapat bahwa fungsi utilitas birokrat tidaklah sekedar memaksimumkan anggaran, tetapi lebih kompleks terahadap itu. Birokrat juga mempunyai kepuasan dalam melayani masyarakat atau melaksanakan tugas bagi kepentingan umum.

1.2.7. Barang Publik dan Barang Privat

Beberapa jenis barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorangpun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta akan tetapi dalam jumlah yang terbatas, misalnya pertahanan, peradilan, dan sebagainya. Jenis barang tersebut dinamakan barang public murni yang mempunyai dua karakteristik utama, yaitu penggunaannya tidak bersaingan (nonrivalry) dan tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian (non excludabilty). oleh karena pihak swasta tidak mau menghasilkan barang public murni, maka pemerintah lah yang harus menghasilkannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan.

Aktivitas pemerintah dapat mempunyai eksternalitas yang penting. Seluruh warga negara akan merasakan manfaat atas berbagai barang yang dibeli oleh pemerintah. Contohnya, penyediaan pertahanan umum. Seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari hal itu, apakah mereka membayar pajak atau tidak. Pemerintah menetapkan sesuatu seperti undang-undang hak milik dan hukum kontrak yang menciptakan lingkungan hukum dimana transaksi ekonomi terjadi. Keuntungan yang timbul dari lingkungan ini dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pemerintah menyediakan banyak barang publik kepada masyarakat. Sekilas, pemerintah tidak jauh berbeda dengan organisasi lain seperti serikat pekerja, asosiasi profesional, atau bahkan perkumpulan seperti klub mahasiswa. Mereka memberikan manfaat dan

menciptakan kewajiban bagi para anggotanya. Namun lebih dari itu, organisasi pemerintah berbeda, terutama karena mereka dapat mencapai skala ekonomis dan karena pemerintah mempunyai kemampuan untuk membiayai aktivitas mereka melalui pendapatan pajak. Umumnya, barang publik harus disediakan oleh pemerintah. Barang ini dikonsumsi secara kolektif. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena pada umumnya swasta enggan terlibat dalam penyediaan tersebut. Oleh karena itu, dalam makalah ini penyusun akan membahas tentang barang publik.

1.2.7.1. Barang Publik (*Public Goods*) dan Barang Privat (*Private Goods*)

Secara umum barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabial dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Ini berarti konsumsi atas barang tersebut oleh sutu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya dan non-eksklusif berarti semua orang berhak menikamti manfaat dari barang tersebut. Contoh barang publik ini diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan dan sebagainya. Akan sulit untuk menentukan siapa saja yang boleh menggunakan papan marka jalan misalnya, karena keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang.

Barang publik (*public goods*) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi